

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp14,0 T (969,3%)
▼ -33,7% (yoy)

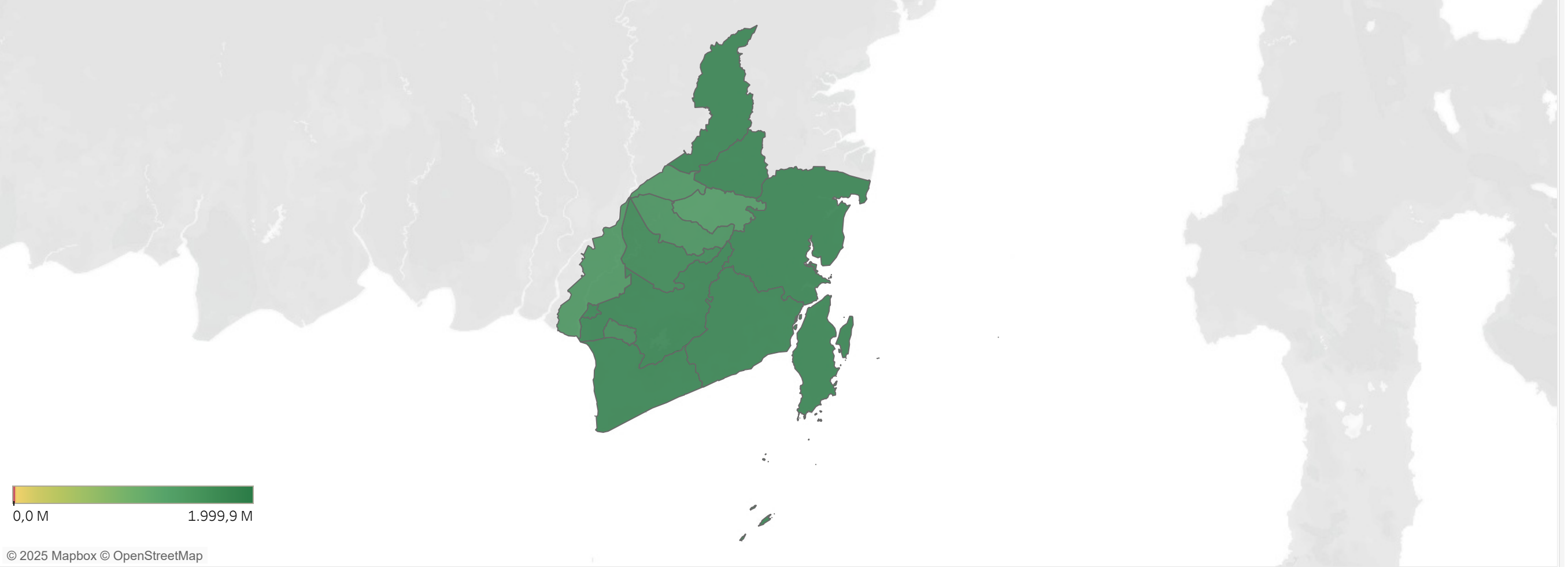
Belanja

Rp39,4 T (94,3%)
▲ 3,2% (yoy)

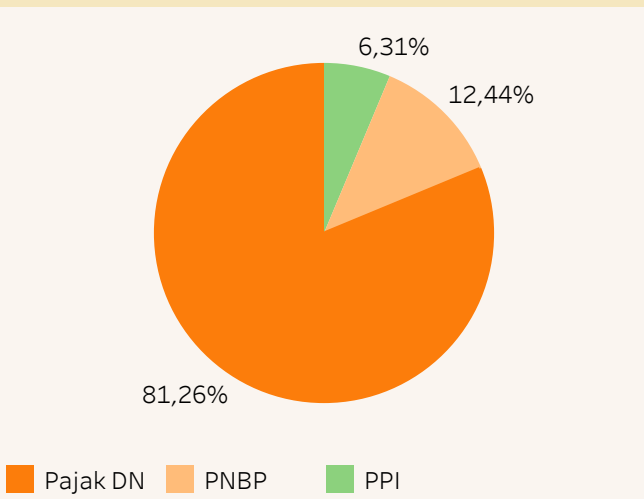
Defisit

Rp-25,4 T (63,0%)
▲ 48,8% (yoy)

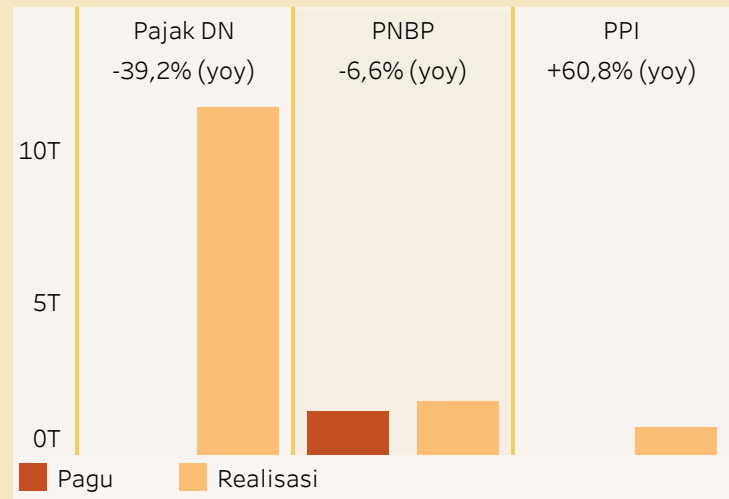
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



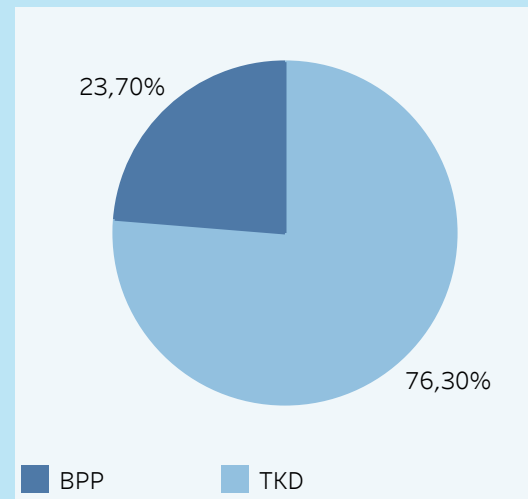
Persentase Komposisi Pendapatan



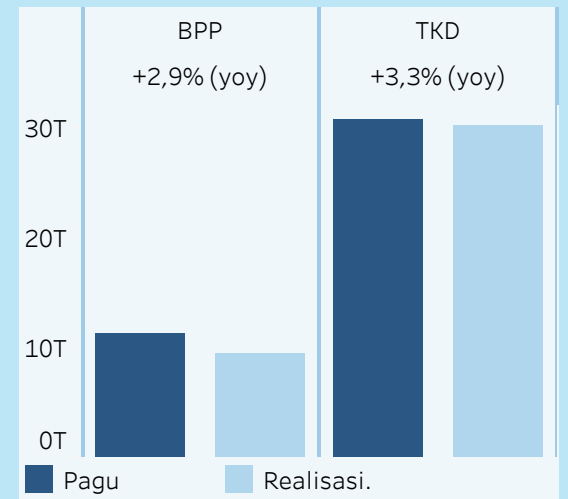
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



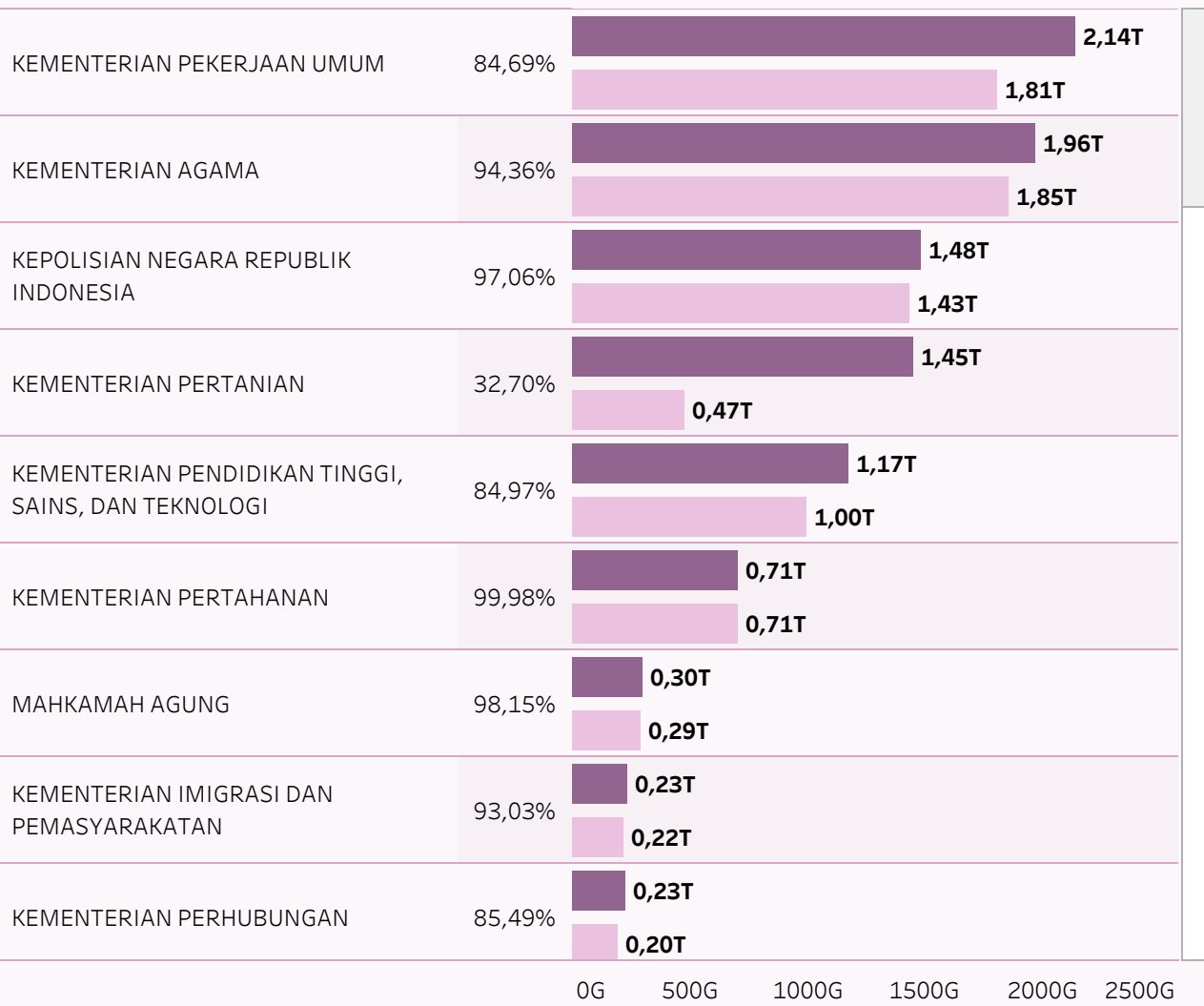
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	21,1T	14,0 T	▼ 33,70%
Grand Total	21,1T	14,0 T	▼ 33,70%

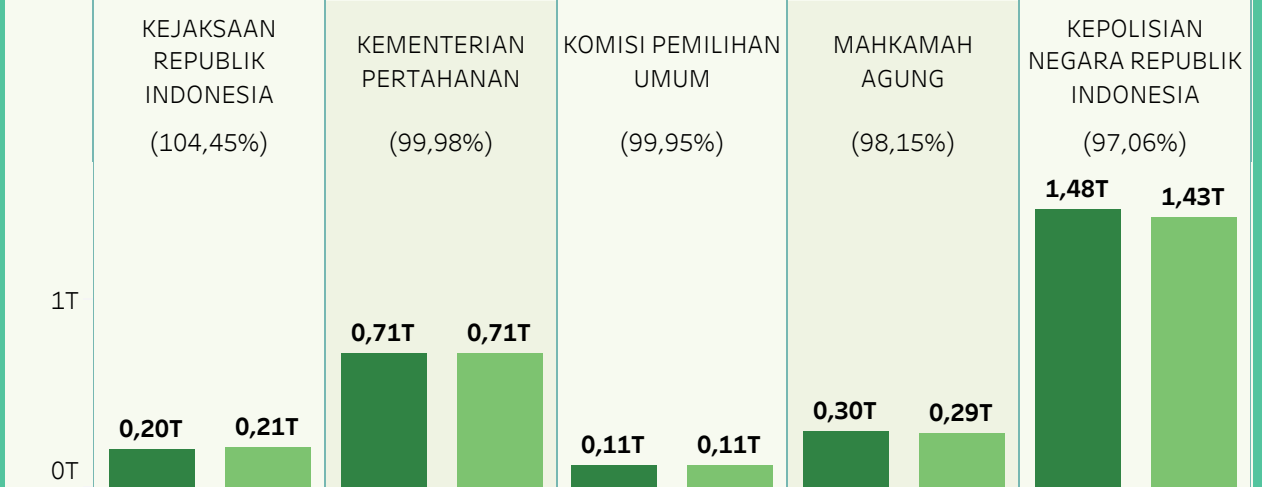
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	38,2T	91,7%	41,8T	39,4 T	94,3%	▲ 3,23%
Grand Total	41,7T	38,2T	91,7%	41,8T	39,4 T	94,3%	▲ 3,23%

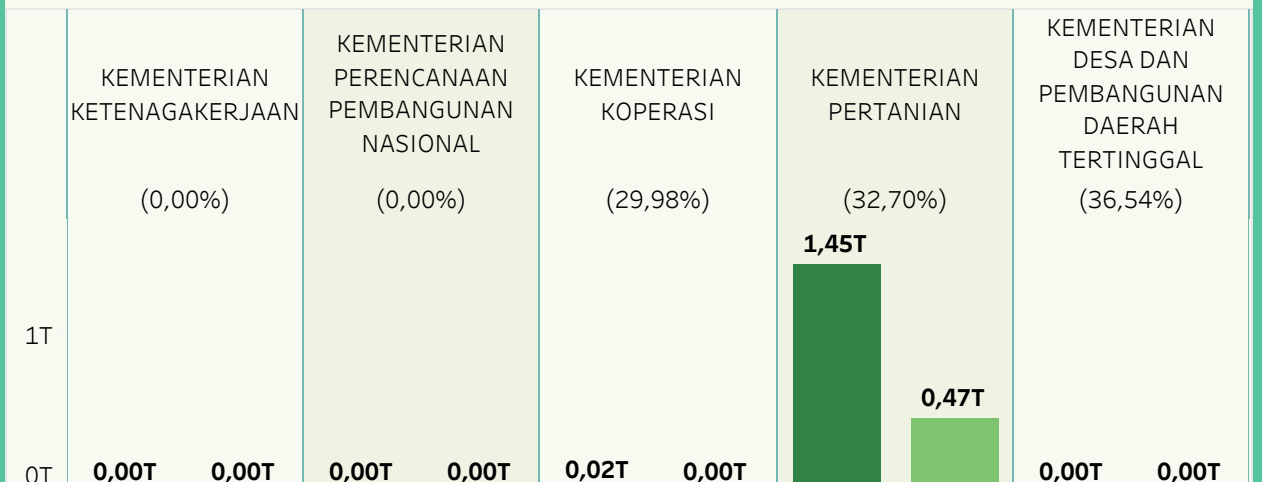
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



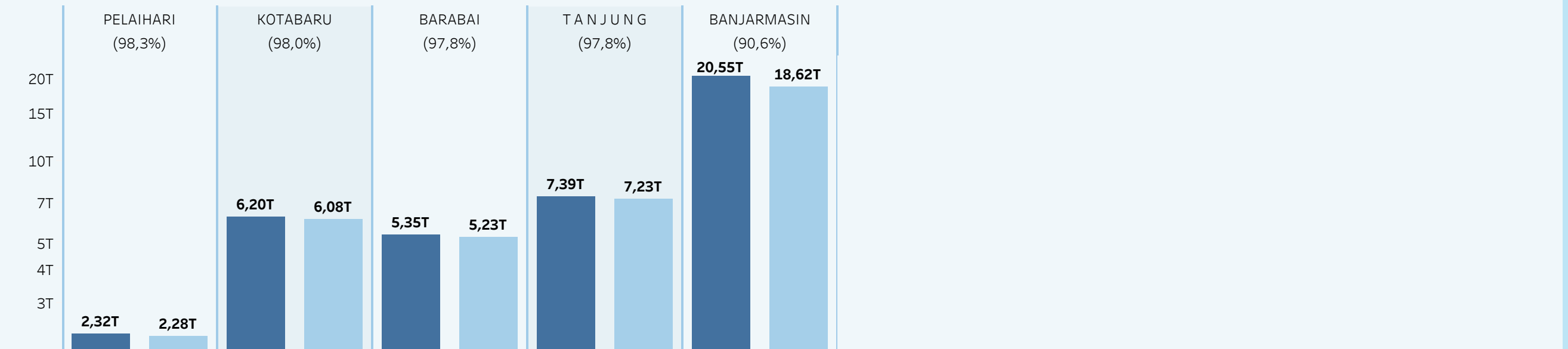
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



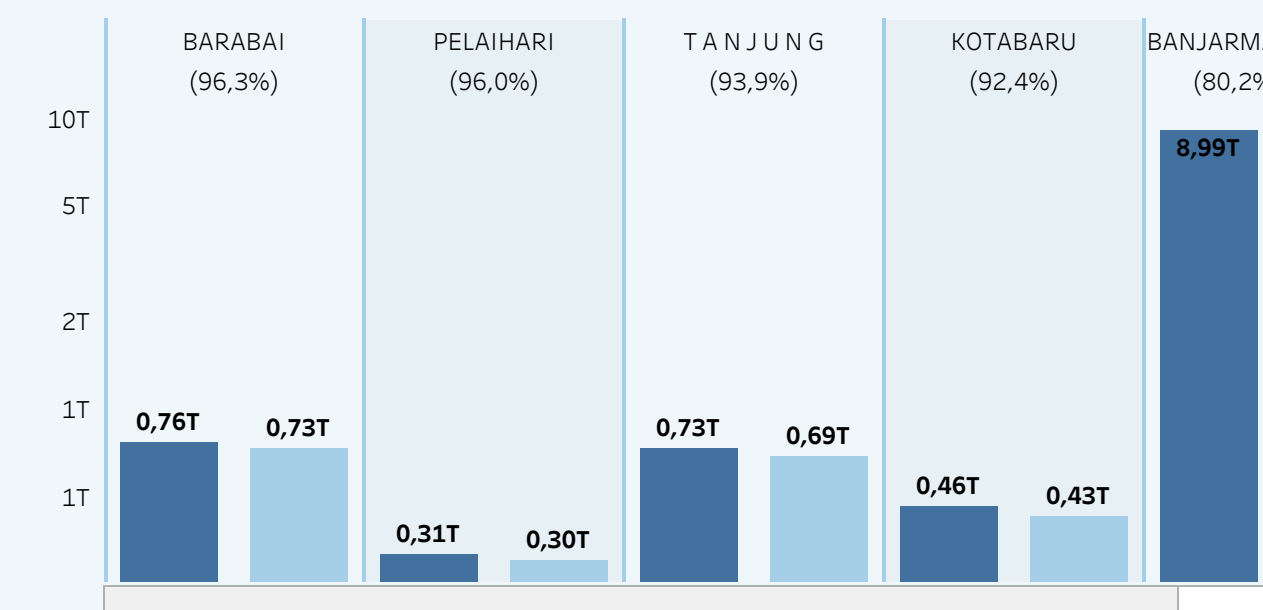
5 KL Persentase Realisasi Terendah



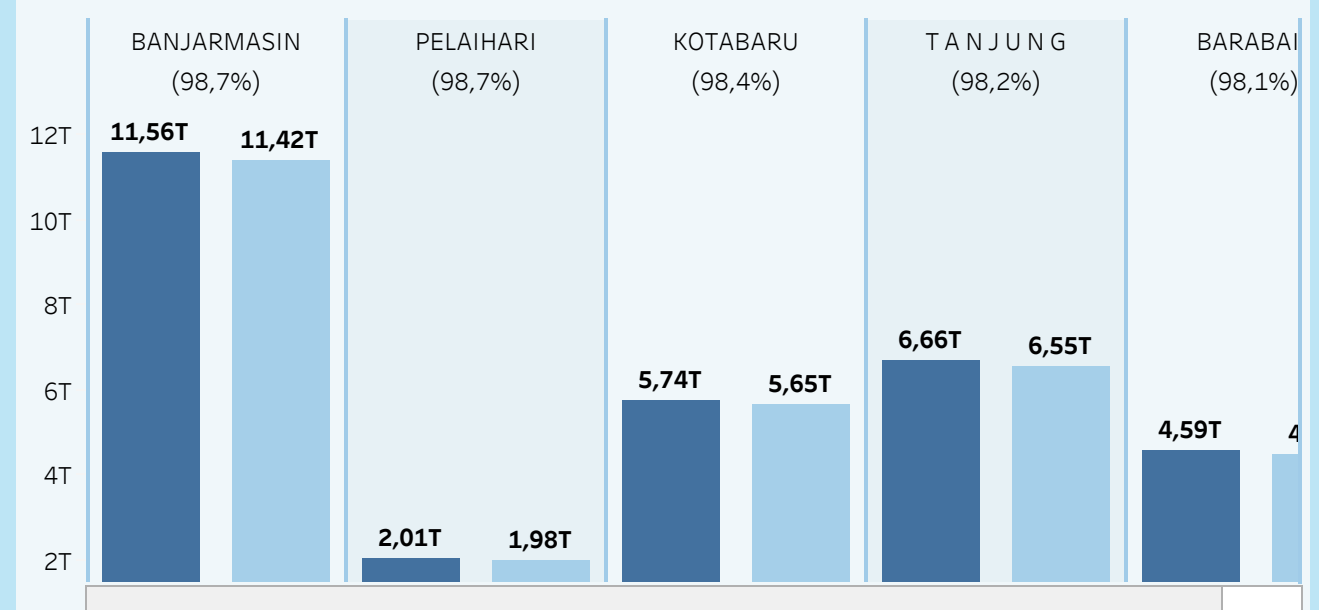
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 24 Desember 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp14,00 triliun (63,48%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,05 triliun, terkontraksi 33,70% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 55,81% (Rp 11,36 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 339,81% (Rp882,72 miliar), serta PNPB mencapai 122,43% (Rp1,74 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (81,20%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 24 Desember 2025

- Kinerja Belanja Negara sebesar Rp39,44 triliun (94,3%) dari pagu Rp41,8 triliun, tumbuh 3,23% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 83,10% (Rp9,35 triliun) dari pagu Rp11,24 triliun, tumbuh 2,94% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 98,46% (Rp30,09 triliun) dari pagu Rp30,56 triliun, tumbuh 3,32% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (76,30%).
- Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,14 triliun, dengan realisasi mencapai 84,69% (Rp1,81 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 99,98% (Rp0,71 triliun) dari pagu Rp0,71 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 32,70% (Rp0,47 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.
- Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kejaksaan RI dengan realisasi 104,45% (Rp0,21 triliun) dari pagu Rp0,20 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Koperasi dengan realisasi 29,98% (Rp4,72 miliar) dari pagu Rp15,75 miliar. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional realisasi belanjanya masih 0%.
- Kinerja KPPN,** Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Pelaihari dengan realisasi sebesar 98,3% (Rp2,28 triliun) dari pagu Rp2,32 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 90,6% (Rp18,62 triliun) dari pagu Rp20,55 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Rencana penetapan bea keluar batu bara oleh pemerintah pusat mulai tahun 2026 menimbulkan dampak beragam bagi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang merupakan salah satu daerah penghasil batu bara utama di Indonesia. Dampak tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan beberapa keuntungan bagi penerimaan negara dan tantangan bagi industri lokal.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyikapi rencana penetapan bea keluar batu bara mulai 2026 secara hati-hati dan kolaboratif dengan merumuskan kebijakan yang berimbang antara kepentingan fiskal nasional dan keberlanjutan daerah penghasil. Penetapan bea keluar sebaiknya disertai skema insentif atau kompensasi fiskal bagi daerah penghasil seperti peningkatan dana bagi hasil, dukungan hilirisasi industri, serta program diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Penetapan APBD-Perubahan lingkup Pemda Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV/Akhir Tahun yang diantaranya mengalokasikan pemberian hibah kepada satker vertikal. hal ini berdampak pada kinerja realisasi belanja sumber hibah karena keterbatasan waktu berakhirnya tahun anggaran dan *closing date* pembayaran hibah.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker penerima hibah perlu melakukan langkah proaktif dengan segera menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan hibah, termasuk perjanjian hibah, rencana penggunaan anggaran, dan dokumen pendukung lainnya, segera setelah APBD-Perubahan ditetapkan. Satker juga perlu menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang realistis serta melakukan percepatan proses pengadaan dan pembayaran sesuai ketentuan.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 11.322 menjadi 11.508 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 10.619 unit menjadi 11.078 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 695 lokasi menjadi 700, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.387.467.727.286,- menjadi Rp1.447.667.422.286,-

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih,

Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

2. Jumlahkoperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (microsite) sebanyak 2.013
3. Jumlahkoperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 802 menjadi 836.
4. Jumlahkeseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 902 menjadi 940.
5. Jumlahkoperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 117 menjadi 118
6. Jumlahpermohonan proposal bisnis semula 380 menjadi 382.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

E | Revitalisasi Sekolah,

Jumlah target revitalisasi sekolah di provinsi Kalimantan Selatan adalah 311 sekolah dan seluruhnya telah dikontrakkan, yang terdiri dari Kementerian PU sebagai penanggungjawab 46 madrasah, Kementerian Dikdasmen sebagai penanggungjawab untuk Ditjen PDM 219 dan Ditjen Vokasi PKPLK 28 sekolah, Kementerian Transmigrasi sebagai penanggungjawab 18 sekolah.

Progres target 46 madrasah, Kementerian PU menargetkan 14 madrasah selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah ditargetkan selesai tahun depan melalui skema multy years contract (MYC).

Progres target 18 sekolah, Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Progres target 247 sekolah, Kementerian Dikdasmen menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

F | SMA Unggul Garuda, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp748,51 M (40,48%) menjadi Rp1,24 T (67,12%) dari pagu sebesar Rp1,85 T.

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Terdapat persyaratan bahwa pada saat akad kredit, perumahan sudah harus terpasang air dan listrik. Di Kalimantan Selatan, kesiapan infrastruktur tersebut belum merata, sehingga pemasangan utilitas di beberapa lokasi masih memerlukan waktu yang cukup lama.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu meningkatkan peran koordinatif dan fasilitatif dengan penyedia utilitas air dan listrik untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dasar pada kawasan perumahan sejak tahap perencanaan.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Gubernur dan Para Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pangdam XXII/Tambun Bungai tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Tindak lanjut konkret atas Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penetapan target waktu (timeline) yang terukur, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah daerah dan pihak terkait

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekolah Rakyat Permanen tersebut berdiri di atas lahan hampir 9 hektare dengan luas bangunan lebih dari 27 ribu meter persegi. Kompleks pendidikan ini dirancang menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pematangan lahan diselesaikan lebih dulu sebelum masuk ke fase pembangunan vertikal. Sekolah Rakyat Permanen ditargetkan beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam mendukung perluasan kebijakan program revitalisasi sekolah Tahun 2026 melalui pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang akurat dan berbasis kondisi riil di lapangan, serta penguatan perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan prioritas nasional. Pihak sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dengan menyampaikan data dan usulan

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Adanya perluasan Kebijakan program revitalisasi sekolah Tahun 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah, meliputi pembangunan ruang belajar baru, rehabilitasi ruang yang rusak, penataan lingkungan sekolah (pagar, akses masuk, ruang tunggu, estetika), dan pengadaan sumber air bersih untuk memastikan sanitasi yang layak.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam mendukung perluasan kebijakan program revitalisasi sekolah Tahun 2026 melalui pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang akurat dan berbasis kondisi riil di lapangan, serta penguatan perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan prioritas nasional. Pihak sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dengan menyampaikan data dan usulan kebutuhan secara tepat, lengkap, dan berkelanjutan.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang *'Go Internasional'* dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Pelaksanaan cetak sawah rakyat tidak dapat mencapai target dikarenakan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat dan kondisi cuaca yang kurang mendukung serta ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria program cetak sawah rakyat.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Pemerintah perlu menyesuaikan jadwal pelaksanaan cetak sawah rakyat dengan kondisi cuaca dan musim tanam serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pemetaan dan kesiapan

lahan, agar pelaksanaan program lebih efektif dan target dapat tercapai.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Program Prioritas
Minggu ke-51



HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Memasuki masa liburan sekolah, MBG tetap dilaksanakan dengan cara pengantaran paket makanan bundling ke sekolah, dengan jumlah makanan yang diantar sesuai dengan kesediaan sekolah berdasarkan data murid yang mau menerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

Sekolah harus memastikan bahwa MBG yang telah tersedia sesuai yang didaftarkan harus sampai pada penerima manfaat MBG.